

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Abdullah H. R, Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung (Ed. pertama, Rajagrafindo Persada 2005).

Hadikusuma H, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia (Ed. ketiga, Mandar Maju 2003).

Muhammad B, Asas-Asas Hukum Adat Suatu Pengantar (Ed. pertama, Pradnya Paramita 1975).

Saragih Bintang R, Politik Hukum (Ed. pertama, CV. Utomo 2006).

Soehino, Tata Negara Penyusunan dan Penetapan Peraturan Daerah (Ed. pertama, Liberty 1997).

Soekanto S, Hukum Adat Indonesia, (Ed. pertama, Cet. keempat, Rajagrafindo Persada 2003).

Soelarto, Budaya Sumba Jilid 1 (Proyek Pengembangan Media dan Kebudayaan Ditjen Kebudayaan Departemen P & K, tanpa tahun).

Soepomo, Bab-Bab Tentang Hukum Adat (Ed. kelima belas, Pradyna Paramita 2000).

Tunggul Ng, Etika Budaya Marapu di Sumba Timur (Ed. pertama, Cet. pertama, Pro Mellenio Center 2006).

Waluyo B, Penelitian Hukum dalam Praktek (Ed. pertama, Sinar Grafika 2002).

Wellem Fredrick D, Injil dan Marapu (Ed. pertama, BPK Gunung Mulia 2001).

## Artikel Jurnal

Djawa Amborius R, 'Ritual Marapu di Masyarakat Sumba Timur' *Avatara* (2014) 2 (1) e journal Pendidikan Sejarah <https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/avatara/article/view/6300> diakses 28 Oktober 2019.

Karen B, 'Murderous Mothers & Gentle Judges: Paternalism, Patriarchy and Infanticide' (2018) 30 (1) *Yale Journal of Law & Feminism* <<https://digitalcommons.law.yale.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1385&context=yjlf>>diakses 28 Oktober 2019.

Kleden D, 'Belis dan Harga Seorang Perempuan Sumba (Perkawinan Adat Suku Wewewa, Sumba Barat Daya, NTT)' (2017) 1 (1) *Jurnal Seni dan Budaya Nusantara* <<https://jsbn.ub.ac.id/index.php/sbn/article/view/3>>diakses 27 Oktober 2019.

Juniarti V, dan ChairulZ, 'Keadilan Bagi Kelompok Minoritas Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Menurut Filsafat Hukum (Contoh Kasus Meliana Di Medan Dituduh Melakukan Penodaan Agama)' (2018) 18 (2) *Jurnal Law Review* <<https://122.200.2.51/index.php/LR/article/view/1258/544>>diakses 6 Desember 2019.

Sari Vincensia Esti P, 'Konsekuensi Hukum Terhadap Status Perkawinan Pasangan Suami Istri Yang Terikat Hubungan Darah Ditinjau Dari Hukum Perkawinan Di Indonesia' (2016) 15 (3) *Jurnal Law Review* <<https://ojs.uph.edu/index.php/LR/issue/viewIssue/134/93>> diakses 6 Desember 2019.

Yusriando, Prasetyo T, RachmiI.G. Ayu K, Anis M, 'Government Responsibilities in Health Care Service based on Dignified Justice' (2018) 15 (4) *South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law* <<http://seajbel.com/wp-content/uploads/2018/05/LAW-Yusriando.pdf>> diakses 28 Oktober 2019.

ZeinYahya A, 'Konsepsi Hak Masyarakat Hukum Adat Sebagai Hak Asasi Manusia' (2015) 3 (2) Jurnal Veritas et Justisia<<http://journal.unpar.ac.id/index.php/veritas/article/view/2689>>diakses 28 Oktober 2019.

### **Tesis**

Layloh Yendri A. H. Y, 'Identitas Penganut Merapu Berhadapan Dengan Gereja dan Program Pariwisata di Sumba Barat' (Tesis Program Magister Ilmu Religi dan Budaya, Universitas Sanata Dharma Yogyakarta 2007).

Yanuaris Lende Wara, Wahyu Purwiyastuti, (tanpa tahun) 'Pergeseran Makna Belis Dalam Adat Perkawinan Masyarakat Sumba', Program Studi Pendidikan Sejarah, Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, [https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/6410/2/PROS\\_Yanuaris%20Lende%20W,%20Wahyu%20P\\_Pergeseran%20Makna%20Belis\\_fulltext.o.pdf](https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/6410/2/PROS_Yanuaris%20Lende%20W,%20Wahyu%20P_Pergeseran%20Makna%20Belis_fulltext.o.pdf) diakses 28 Oktober 2019.

### **Website**

Pejabat Pengelola Informasi Daerah, 'Geografis: Peta Wilayah Nusa Tenggara Timur' <<https://ppid.nttprov.go.id/tentang-provinsi-ntt/>> diakses 12 September 2019.

Widiyani R, 'Indonesia Tetapkan 538 Komunitas Masyarakat Hukum Adat' (Harian Nasional, 29 Januari 2019) <<http://www.harnas.co/2017/01/29/indonesia-tetapkan-538-komunitas-masyarakat-hukum-adat>> diakses 10 September 2019.

### **Makalah Seminar/Konferensi**

Karo Karo, Rizky P.P. Parluhutan, Dian, Tanaya, Velliana, 'Penyuluhan Hukum tentang Human Trafficking dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Masyarakat Sumba' (Seminar Nasional Hasil Pengabdian kepada Masyarakat 2019 dengan tema 'Keberlanjutan Program Pemberdayaan Masyarakat Era Revolusi Industri 4.0', Universitas Katolik Atma Jaya Jakarta, 26-27 September 2019).

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah Dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

**TESIS/DISERTASI**

Purwadi Soeriadiredja , Disertasi berjudul Marapu: Agama dan Identitas Budaya Orang Umalulu Sumba Timur, Disertasi pada Pasca-Sarjana Universitas Indonesia 2012, hlm.171

Purwadi Soeriadiredja , Disertasi berjudul Marapu: Agama dan Identitas Budaya Orang Umalulu Sumba Timur, Disertasi pada Pasca-Sarjana Universitas Indonesia 2012, hlm.171

